

## ABSTRAK

**Nuraeni.** 2020. Gerakan sosial Dalam Penolakan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang di bimbing oleh Bapak Amir Muhiddin selaku pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing selaku pembimbing II.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui hasil Gerakan sosial Dalam Penolakan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan serta menjelaskan Gerakan sosial Dalam Penolakan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Lingkungan sekretaris Kecamatan, KPA, WALHI, Ketua Kelompok Tani sekaligus Tokoh Penggerak Penolakan Perkebunan Kelapa Sawit, Masyarakat. Data yang di peroleh dari hasil penelitian di kaji dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan sosial Dalam Penolakan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Ada tiga indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Mobilisasi Sumber Daya, dimana gerakan sosial dianggap berhasil jika memiliki uang dan organisasi yang kuat, termasuk melibatkan banyak orang, Struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial, hal ini sudah berjalan dengan efektif dalam penerapan penolakan penanaman kelapa sawit (2) Struktur kesempatan politik, dalam struktur kesempatan politik ini berupaya menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan, (3) *Teori fram* (Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana). Hal ini berkaitan dengan upaya para pelaku penggerak gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan publik.

**Kata Kunci :** *Gerakan Sosial, Penolakan Kebijakan, Enrekang*